

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia menganut budaya patriarki sehingga membuat perempuan sulit terjun kedalam dunia politik praktis. Budaya patriarki membuat perempuan dan politik seolah menjadi garis yang bertolak belakang. Perempuan sendiri dianggap lebih cocok berada di rumah menjadi ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah saja, sekalipun perempuan bisa bekerja itu pun dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Sehingga terjadi kesenjangan yang melahirkan Subordinasi pada perempuan yang dianggap irrasional dan emosial sehingga perempuan tidak dapat tampil memimpin dan ditempatkan diposisi yang tidak penting¹. Bahkan dalam bidang pekerjaan pun perempuan sering dianggap tidak layak untuk tampil memimpin, tidak layak megemban tanggungjawab yang terlalu sentral, sehingga dominasi yang dilakukan oleh kaum laki – laki yang identik dengan kekuasaan mempersempit ruang gerak perempuan itu sendiri. Sedangkan perempuan juga memiliki hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia menurut Pancasila, hakikat manusia adalah tersusun dari jiwa dan raga, kedudukan kodratnya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun

¹ Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 15.

sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.² Adanya anggapan bahwa perempuan hanya untuk mengurus urusan domestik rumah tangga dan politik hanya cocok untuk kaum laki-laki, membuat banyak perempuan tidak percaya diri untuk terjun ke dunia politik. Hal ini menjadi penyebab kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Hal ini sudah terjadi sejak Indonesia pada jaman penjajahan dulu, dimana nilai – nilai tradisi yang cenderung membelenggu perempuan, menjadikannya tergantung pada laki – laki, menjadi perempuan menjadi kaum yang tidak berdaya dan seakan mereka tidak diberi peranan signifikan dalam komunitas masyarakatnya.³ Kultur dan budaya masyarakat pada jaman itu menjadi salah satu faktor kesenjangan bagi perempuan, adat dan kultur Jawa yang menjadikan perempuan terbatas ruang geraknya dalam memperjuangkan hak – haknya. Faktanya Indonesia tak lepas dari sejarah perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kebebasan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Ibu Kita Kartini dalam memperjuangkan hak dan emansipasi perempuan.

Perjuangan dan strategi Kartini untuk mengatasi permasalahan yang dialami kaum perempuan adalah melalui pendekatan Pendidikan. Kartini beranggapan bahwa Pendidikan menjadi salah satu syarat utama untuk membebaskan diri dari segala kekurangan, serta pendidikan dapat mengubah

² Justisia, Vita, *Peran Ilmu Politik dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, hal 150

³ Nuroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus utamaanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 88.

sistem nilai masyarakat dan memberi kesempatan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.⁴

Pergerakan perempuan di masa lampau menjadi ujung tombak bagi kaum perempuan sendiri, perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak – haknya membersi stimulus yang baik pada jaman sekarang, dimana sudah banyak wadah atau organisasi perempuan yang menampung aspirasi – aspirasi perempuan serta kajian – kajian yang memperjuangkan hak – hak perempuan. Meski demikian, kesetaraan gender menjadi suatu kajian yang penting untuk kehidupan perempuan, bukan hanya sebatas memperjuangkan peran dalam masyarakat, bahkan dalam bidang sosial dan politiknya.

Dalam bidang politik sendiri perempuan masih sering terjadi kesenjangan, dimana perempuan dianggap tidak layak untuk menempati sebuah jabatan, bahkan mengambil keputusan. Dominasi kaum laki – laki serta kultur dan budaya mempersulit kaum perempuan untuk tampil dalam memperjuangkan hak – haknya, khususnya di dalam pengampu kebijakan.

Bahwasannya fenomena keterwakilan perempuan dalam bidang politik mendapat peluang yang diatur langsung oleh Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik, dan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 30% keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pencalonan legislatif setiap tingkatnya.

⁴ *Ibid.*

Meski pencapaian perempuan sudah terbilang banyak, namun tetap saja masih bersifat patriarki. Bahwa peran perempuan masih terhambat oleh birokrasi paternalistik, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang serta kurangnya fungsi partai politik dalam Pendidikan politik bagi kaum perempuan.

Orientasi pengembangan peran perempuan didasarkan pada model *Women in Development (WID)*, dengan asumsi bahwa ada ketertinggalan peranan perempuan yang disebabkan oleh kurangnya Pendidikan dan terbelakang.⁵ Kaum perempuan dianggap tidak tanggap terhadap tantangan pembangunan, oleh karna itu perempuanlah yang digalang atau diaktifkan agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam upaya tersebut dibutuhkan sebuah wadah untuk menyosong Pendidikan bagi kaum perempuan. Salah satunya organisasi perempuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dimana ada beberapa organisasi wanita yang tergabung didalamnya, yakni setidaknya ada 60 organisasi wanita yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), diantaranya PKK, Bhayangkari, Dharma Wanita Persatuan (DWP), IAD (Ikatan Adhiyaksa Dharmakartini), Perkumpulan Srikandi Kreatif Indonesia (Persikindo), Kopr HMI-Wati (KOHATI), Persatuan Istri Prajurit (PERSIT), Dharma Pertiwi, Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) dan masih banyak lagi. GOW sendiri mewadahi organisasi – organisasi perempuan yang memiliki tujuan agar

⁵ Abdullah, Irwan, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 278

perempuan tidak hanya berpangku tangan di rumah saja dan memiliki peran sebatas mengurus urusan rumah tangga saja.

Dalam uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran organisasi tersebut dalam partisipasi politik perempuan dengan mengambil judul: **GENDER DAN POLITIK (Studi Analisis Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Ciamis)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam partisipasi politik perempuan di Kabupaten Ciamis

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah dan fokus utamanya sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah maka penulis membatasi penelitian ini dalam konteks Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Ciamis.

D. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, mendalami dan menjelaskan bagaimana Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Ciamis.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait pemberdayaan perempuan sehingga bisa menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perempuan khususnya di Kabupaten Ciamis untuk lebih berdaya guna dan memberikan efek positif bagi kaum perempuan.